PENGANTAR: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROF. DR. NOVITA TRESIANA, M.SI



Gambar : Proses Kebijakan Publik

STAGE I ANGENDA SETTIG

STAGE VI POLICY TERMINATION

STAGE V POLICY

CHANGE

STAGE II POLICY FORMULATION

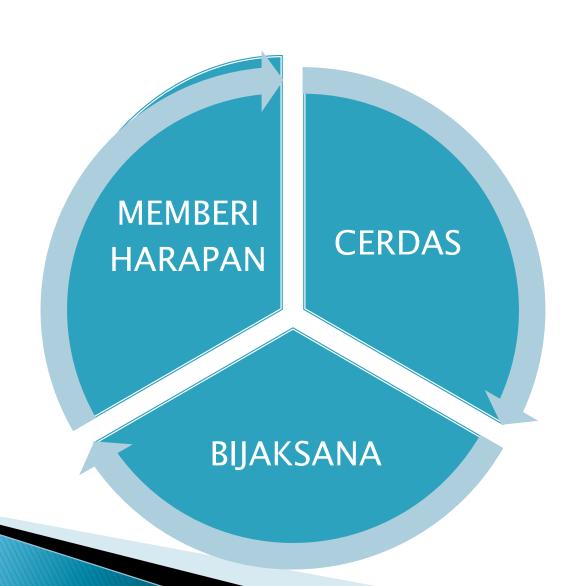
STAGE III POLICY IMPLEMENTATION

STAGE IV POLICY EVALUATION

BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

- KEBIJAKAN E-KTP
- PNPM MANDIRI PERKOTAAN/PEDESAAN
- INDONESIA SEHAT
- JAMKESMAS
- PEMEKARAN KELURAHAN/KEC
- KOTA BARU
- BINA LINGKUNGAN
- **BRT**

3 INTI KEBIJAKAN YANG EXCELLEN/UNGGUL



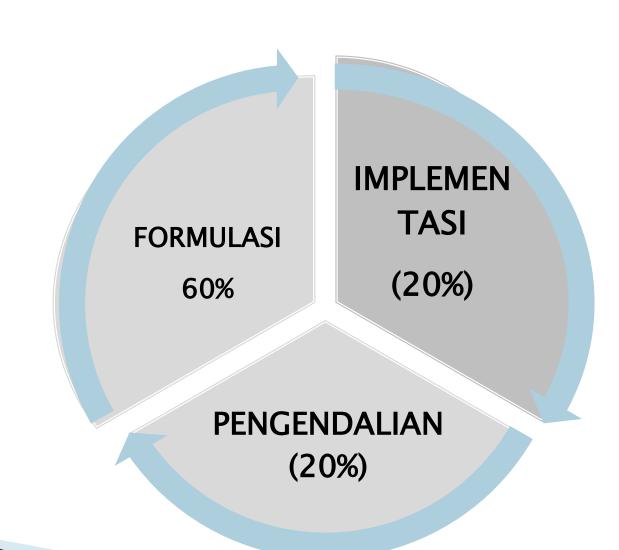
Mengapa implementasi penting?

- Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987)
- Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (udoji, 1981)

- Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya.
- Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit.
- Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi
- Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya
- Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional

FAKTA-FAKTA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

MENGAPA LEBIH BANYAK KEBIJAKAN YANG GAGAL KETIMBANG BERHASIL?



IMPLEMENTASI MYOPIA

RESOURCE DIHABISKAN UTK PLANNING, TAK CUKUP UTK IMPLEMENTASI

> KEBIJAKAN YG SDH DISUSUN, DIPUTUSKAN, DIUNDANGKAN, RAKYAT DIANGGAP TAHU DAN DIHUKUM

> > KEBIJAKAN YG SDH DIBUAT, IMPLEMENTASI JALAN DGN SENDIRINYA

DISKUSI

REALITAS IMPLEMENTASI

- MENGAPA suatu kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik, dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan?
- MENGAPA suatu kebijakan nasional yang sama diimplementasikan oleh pemerintah daerah memiliki variasi keberhasilan implementasi yang berbeda-beda?
- MENGAPA suatu jenis kebijakan tertentu lebih mudah/lebih berhasil diimplementasikan dibanding dengan yang lain?.

KONSEPTUALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Apa itu implementasi?

- Jones (1987); those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)
- Van Horn dan Van meter (1975): those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy (tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)

Mazmanian & Paul Sabatier

Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan.

Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Kesimpulan umum

- Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan
- Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.
- Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target

IMPLEMENTASI DLM PRAKTIK

Apakah Kebijakan Publik dapat langsung diimplementasikan?

Tidak

Υa

Buat kebijakan pelaksana

Buat prosedur implementasi

Implementasi basic good governance:

- 1. Transparansi
- 2. Akuntabilitas
- Adil-wajar (Fairness)
 - 4. Responsivitas

Alokasikan sumberdaya

Sesuaikan prosedur implementasi dengan sumberdaya yang dipergunakan

> Kendalikan pelaksanaannya

Evaluasi implementasi

MENGAPA PERLU PENJELAS

DELIVERY SYSTEM
(ORGANISASI
PENYAMPAI&NILAI)

POLICY INPUT (INSTRUMEN KEBIJAKAN)



SUMBERDAYA (ANGGARAN)

IMPLEMENTASI

BENTUK POLICY OUTPUT

RANGSANGAN

- SUBSIDI
- HIBAH
- VOUCHER
- KONTRAK
- BLT (BANTUAN LAGSUNG TUNAI)

BENTUK POLICY OUTPUT

RULES/
PENGATURAN
PRILAKU

- · UU
- PERDA

RIGHTS //MEMBERI HAK
PADA KELOMPOK ORG TT

- TIM 9
- POKJA

POWER/PEMBERIAN KEKUASAAN PADA LEMBAGA TT UTK MENGOPTIMALKAN PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN

LINGKUP KEGIATAN IMPLEMENTASI KP

AKTIVITAS IMPLEMENTASI (SEMPIT)

KEGIATAN RUTINITAS (ADMINISTRATIF) COMMAND AND
CONTROL
(PIMPINAN)

AKTIVITAS IMPLEMENTASI

MENGELOLA DISTORSI KOMUNIKASI TTG MAKNA KEBIJAKAN (TUJUAN, MANFAAT, SASARAN) POLA RELASI ANTARA BERBAGAI UNIT ORGANISASI/INDIVIDU YG MEMILIKI OTORITAS DLM HIRARKI ORGANISASI

DESAIN IMPLEMENTASI DLM ARTI SEMPIT

LOGIKA BERFIKIR DARI ATAS (PIMPINAN-BAWAHAN/KEBIJAKAN-PELAKSANAAN LAPANG)

COMMAND AND CONTROL : PIMPINAN MENERJEMAHKAN&MENGAWASI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DI LAPANGAN : SESUAI DENGAN COMMAND (PERINTAH)

KEPALA DINAS : 1) MEMAHAMI TUJUAN KEBIJAKAN 2)
MENGKOMUNIKASIKAN KPD KEPALA BIDANG 3) MENGAWASI
PELAKSANAAN

KEPALA BIDANG: 1) MEMAHAMI PERINTAH KEPDIS 2)
MENGKOMUNIKASIKAN KPD KASUBSI 3) MENGAWASI
PELAKSANAAN

KEPALA SUB BIDANG: 1) MEMAHAMI PERINTAH KABID 2)
MENGKOMUNIKASIKAN KPD STAF 3) MENGAWASI PELAKSANAAN

STAF GARDA DEPAN : 1) MEMAHAMI PERINTAH KASUB BID 2) MELAKSANAKAN

KELOMPOK SASARAN

Distorsi Komunikasi

LINGKUP KEGIATAN IMPLEMENTASI DALAM ARTI LUAS

PEMAKNAAN IMPLEMENTASI (LUAS)

GRINDLE, 1980

MERUPAKAN KEGIATAN ADMINISTRASI-POLITIK YG BUKAN SEMATA BERKAITAN DGN MEKANISME PENJABARAN KEPUTUSAN POLITIK KE DALAM PROSEDUR RUTIN LEWAT SALURAN BIROKRASI, MELAINKAN MENYANGKUT BANYAK AKTOR PLUS KEPENTINGAN (KONFLIK), MENGAMBIL **KEPUTUSAN ATAS 'SIAPA' YANG** MEMPEROLEH APA DARI SUATU KEBIJAKAN

3 AKTIVITAS IMPLEMENTASI (LUAS)

PENERAPAN /MANAJEMEN PROGRAM

(PILIHAN SIAPA YG MENERIMA SUMBERDAYA) (PILIHAN
DIFINISI
KEBIJAKAN/
PROGRAM)/

RENCANA TINDAKAN

PENGORGANISASIAN (ORANG/LEMBAGA, DANA, SUMBERDAYA, METODE)

APA TUJUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

TUJUAN : Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Menggambarkan Pencapaian Tujuan Implementasi

Miskin dan Tidak Sejahtera



Makmur dan Sejahtera

UKURAN/PARAMETER

CONTOH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMISKINAN PERKOTAAN

/PROGRAM
(POLICY
INPUT)

• TUJUAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MISKIN

PERKOTAAN DENGAN

MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN&KEMANDIRIAN

DGN KEGIATAN EKONOMI

PRODUKTIF DAN PERBAIKAN

KONDISI LINGKUNGAN MELALUI

PROGRAM: KREDIT MODAL,

HIBAH DAN PELATIHAN

LANJUTAN

POLICY OUTPUT

- CAKUPAN KELUARGA MISKIN YG DPT KREDIT&PELATIHAN
- AKSESBILITAS KAUM
 MISKIN THD MODAL
- KEMAMPUAN
 MENJAGA
 LINGKUNGAN

LANJUTAN

INITIAL OUTCOME

- PENINGKATAN
 KETRAMPILAN
- PENINGKATAN
 MODAL KERJA
- PERBAIKAN
 KONDISI
 LINGKUNGAN

LANJUTAN

INTERMEDITE/LONG OUTCOME

- PENINGKATAN
 PENDAPATAN
- PENINGKATAN
 NILAI JUAL ASET
 TANAH DAN
 RUMAH

TUGAS 1: CONTOH REALITAS IMPLEMENTASI DAN ANALISIS REALITAS, MENGAPA

- MENGAPA suatu kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik, dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan?
- MENGAPA suatu kebijakan nasional yang sama diimplementasikan oleh pemerintah daerah memiliki variasi keberhasilan implementasi yang berbeda-beda?
- MENGAPA suatu jenis kebijakan tertentu lebih mudah/lebih berhasil diimplementasikan dibanding dengan yang lain?.